

Perbandingan Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Di Indonesia Dan Jepang

Fitri Nabila¹, Timbul Dompok², Etika Khairina³

Administrasi Negara, Sosial Humaniora, Universitas Putera Batam, Kepri

pb231010003@upbatam.ac.id

Abstract

Halal tourism is a rapidly growing segment of the tourism industry with significant economic potential. Both Indonesia and Japan have sizeable Muslim populations and have shown their commitment in developing halal tourism. In the Global Muslim Travel Index (GMTI) Indonesia won the title of Top Muslim Friendly Destination of the Year 2023 while Japan is ranked 6th in the Global Muslim Friendly Destination category for Non-OIC countries. The method used in this research is qualitative research method with comparative study. The purpose of this study is to compare the implementation of halal tourism policies in Indonesia and Japan.

Keywords Policy; Halal Tourism; Indonesia; Japan.

Abstrak

Pariwisata Halal adalah segmen industri pariwisata yang berkembang pesat dengan potensi ekonomi yang signifikan. Indonesia dan Jepang memiliki populasi Muslim yang signifikan dan telah menunjukkan komitmen mereka dalam mengembangkan pariwisata halal. Dalam Global Muslim Travel Index (GMTI), Indonesia memenangkan gelar Top Muslim Friendly Destination of the Year 2023 sementara Jepang berada di urutan keenam dalam kategori Global Muslim friendly Destinations untuk negara non-OIC. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan studi komparatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan implementasi kebijakan pariwisata halal di Indonesia dan Jepang.

Kata Kunci Kebijakan; Pariwisata Halal; Indonesia; Jepang.

1. Pendahuluan

Pariwisata adalah industri yang memiliki potensi besar karena telah berkembang menjadi yang terbesar dan tercepat di dunia saat ini. Selain itu, sektor ini telah menjadi bagian penting dari pertumbuhan usaha, penyerapan tenaga kerja, pendapatan devisa, dan pembangunan infrastruktur, karena sangat berdampak positif pada ekonomi dunia. Hal ini didorong oleh meningkatnya jumlah wisatawan Muslim yang mencari destinasi yang memenuhi kebutuhan dan preferensi mereka yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dalam bidang pariwisata, istilah "pariwisata halal merupakan ide baru yang mengacu pada penyediaan paket wisata dan destinasi yang dirancang khusus untuk wisatawan Muslim (Damayanti, n.d.). Wisata halal di Indonesia memiliki banyak istilah. Istilah wisata religi pada awalnya dikenal karena perkembangan global (Rachmattie et al., 2020). Namun, konteks wisata halal kini berkembang menjadi lebih luas seiring perkembangan zaman. Wisata halal tidak lagi didefinisikan sebagai wisata religi atau spiritual semata. Sekarang mencakup berbagai tujuan seperti pendidikan, pengobatan, sejarah,

budaya, atau bahkan olahraga yang menawarkan sejumlah fitur dan simbol Islam. (Surwandono et al., 2020)

Pariwisata halal menjadi fokus penting bagi negara-negara dengan populasi muslim yang signifikan, seperti Indonesia dan Jepang. Pariwisata halal, yang menawarkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tidak hanya menarik bagi wisatawan Muslim tetapi juga menjadi strategi penting dalam pengembangan sektor pariwisata secara keseluruhan. Dua negara yang menonjol dalam mengembangkan kebijakan pariwisata halal adalah Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan Jepang, negara maju tren peningkatan jumlah wisatawan Muslim. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman budaya dan agama, telah memperkenalkan berbagai inisiatif untuk memperluas sektor pariwisata halal. Dari promosi destinasi yang ramah Muslim hingga sertifikasi halal untuk fasilitas akomodasi makanan, Indonesia telah mengambil Langkah-langkah signifikan untuk menarik lebih banyak wisatawan Muslim dan meningkatkan

pengalaman mereka selama berlibur di negara ini.

Di sisi lain, Jepang, meskipun tidak memiliki mayoritas populasi Muslim, telah mengalami peningkatan signifikan dalam jumlah wisatawan Muslim yang berkunjung. Salah satu kekuatan Jepang untuk mencapai visi negaranya yaitu dengan membuat pariwisata halal (Yasin, n.d.). Hal ini mendorong pemerintah Jepang mengadopsi kebijakan-kebijakan yang ramah Muslim, seperti menyediakan fasilitas sholat di tempat umum, menyediakan makanan halal, dan mengembangkan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. (Alty Amalia et al., n.d.).

Tentunya untuk Investasi wisata halal di negara minoritas muslim seperti Jepang pasti akan menjadi pilihan yang sulit bagi para investor. Banyak tempat wisata Jepang yang harus disesuaikan dengan prinsip Islam. Sering kali, kebutuhan wisatawan non-muslim akan bertentangan dengan penyesuaian tersebut. Dengan adanya wisatawan muslim maka produsen makanan halal di Jepang juga meningkat (Malang, 2017).

Menurut *Global Muslim Traveler Index* (GMTI) Indonesia berhasil meraih predikat *Top Muslim Friendly Destination of The Year 2023*. Sedangkan Jepang berada di peringkat ke-6 dalam kategori *Global Muslim Friendly Destination* untuk negara Non-Oki.

Meskipun Indonesia dan Jepang memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan pariwisata halal, keduanya menghadapi tantangan yang serupa, termasuk dalam hal sertifikasi halal, promosi destinasi, dan peningkatan kesadaran akan kebutuhan wisatawan Muslim. Dalam konteks ini, perbandingan implementasi kebijakan pariwisata halal antara Indonesia dan Jepang menjadi penting untuk mengevaluasi keberhasilan dan tantangan yang dihadapi oleh kedua negara.

2. Kajian Literatur

Kebijakan adalah serangkaian alternatif yang siap dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Sedangkan kebijakan berkaitan dengan Keputusan yang membolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, situasi darurat dan sebagainya. Thomas R. Dye menyatakan bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.

Kebijakan adalah Tindakan pemerintah, baik tertulis maupun tidak tertulis, untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah. (Munir & Dimiyati, 2018). Sedangkan, menurut

(Rachmatie et al., 2020) Kebijakan sendiri didefinisikan sebagai serangkaian Tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah suatu rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.

Pariwisata secara etimologi pariwisata berasal dari Bahasa sansekerta "pari" yang berarti seluruh, semua atau penuh dan "wisata" berarti perjalanan. Pariwisata dimaknai sebagai perjalanan yang penuh atau lengkap, yaitu bepergian dari suatu tempat tertentu ke satu atau beberapa tempat lain, singgah atau tinggal beberapa saat tanpa bermaksud untuk menetap, dan kemudian kembali ke tempat asal.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Sedangkan menurut Ogranisasi Pariwisata Dunia (UNWTO), pariwisata adalah industri yang menyediakan jasa bagi orang-orang yang melakukan perjalanan dan tinggal di tempat lain di luar tempat tinggalnya dalam jangka waktu yang singkat, untuk alasan apa pun selain bekerja dan mendapatkan upah dari tempat yang dikunjungi.

Menurut (Munir & Dimiyati, 2018) Pariwisata adalah kegiatan sementara yang dilakukan di luar kerja dalam waktu singkat dengan tujuan untuk berwisata dan mendapatkan fasilitas untuk digunakan selama kegiatan berlangsung.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi komparatif. Menurut Bogdan dan Sari Knopp Biklen penelitian kualitatif adalah upaya untuk memahami fenomena dalam konteks alamiahnya, dengan fokus pada interpretasi makna yang diberikan oleh orang-orang sekitar. Sedangkan menurut Arikunto (2019) kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data maupun informasi mengenai status suatu fenomena yang ada. Adapun pendekatan studi komparatif. Menurut Sugiyono (2017) studi komparatif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk membandingkan nilai satu atau lebih variable mandiri pada dua atau lebih populasi, sampel atau waktu yang berbeda. Hudson (2007) menjelaskan bahwa studi komparatif dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih data yang diteliti baik membandingkan

perbedaan maupun persamaan atas pemikiran tertentu.

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan studi Pustaka. Studi Pustaka merupakan serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (dokumen, dan jurnal ilmiah). Penelitian kepustakaan atau kajian literature (literature review, literature research) merupakan penelitian yang meninjau secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan di dalam literature yang berorientasi akademik (academic oriented literature) serta merumuskan kontribusi teoritis dan metodologinya untuk topik tertentu (Farisi, 2010).

4. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian kebijakan pariwisata halal

Kebijakan pariwisata merupakan sebuah produk dari proses yang sangat kompleks dan terkait dengan berbagai aspek. Kompleksitas pariwisata disebabkan oleh berbagai perubahan besar pada level local, nasional dan internasional. Dalam konteks perubahan besar tersebut lingkungan kebijakan pada pariwisata menjadi media yang strategis bagi pemerintah untuk memasarkan potensi wisatanya, oleh karenanya kebijakan pariwisata menjadi sangat strategis dan penting dalam pengembangan pariwisata.

Pariwisata adalah industri yang multidimensi dan lintas sektoral, keterlibatan semua pihak dibutuhkan karena pariwisata bukan sektor yang berdiri sendiri. Adapun definisi yang lebih luas dikemukakan oleh Edgell yang bahwa kebijakan pariwisata merupakan kerangka etis yang terfokus pada isu-isu yang dihadapi dan mempertemukan secara efektif keinginan/kebutuhan Masyarakat dengan rencana, Pembangunan, produk, pelayanan, pemasaran, serta tujuan dan sasaran keberlanjutan bagi pertumbuhan pariwisata di masa yang akan datang. Perencanaan kepariwisataan memperkuat memperkuat kedudukan kebijakan kepariwisataan dalam pembangunan, model pengembangan pariwisata mencakup pernyataan visi dan misi yang diikuti oleh serangkaian tujuan, sasaran, strategi, dan taktik dalam mengembangkan pariwisata.

Kebijakan dan perencanaan kepariwisataan seharusnya dapat berfungsi secara efektif sebagai arah pembangunan kepariwisataan suatu destinasi, namun pada kenyataannya banyak sekali konflik kepentingan di tingkat para pengambil Keputusan pada saat mengimplementasikan kebijakan maupun perencanaan

kepariwisataan yang sebenarnya sudah disepakati bersama sehingga perkembangan pariwisata sudah tidak lagi mengacu pada kebijakan dan perencanaan yang sudah dibuat.

Pada dasarnya, pariwisata halal yaitu bentuk pariwisata religius yang mewakili lepatuhan dan ketaatan terhadap ajaran Islam, menawarkan tujuan yang menyediakan produk dan layanan halal yang cocok untuk wisatawan Muslim. Pariwisata halal memberikan alternatif pilihan bagi wisatawan Muslim karena meyakinkan mereka bahwa masalah dan hal-hal yang berkaitan dengan kepatuhan hukum Syariah dipecahkan. Dalam arti tertentu ini maka, memberikan wisatawan Muslim ketenangan pikiran disaat melakukan perjalanan, sebagai lawan dari pariwisata konvensional, di mana wisatawan Muslim harus secara aktif mencari produk dan layanan berbasis halal atau menghindari hal-hal yang dilarang untuk mematuhi syariat Islam.

Agama sangat berhubungan dengan halmnya pariwisata halal, yang mana telah diakui sejak lama sebagai factor yang berpengaruh dalam pariwisata. Wisata Syariah atau pariwisata halal adalah salah satu kegiatan pariwisata yang di peruntukkan bagi wisatawan Muslim maupun non-muslim yang pelaksanaannya mematuhi aturan syariah atau sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Pariwisata Syariah dapat didefinisikan sebagai berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan pemerintah, Masyarakat, pengusaha, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah (Millatina et al., 2019).

2. Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Indonesia

Pertumbuhan kunjungan wisatawan ke Indonesia menjadi divisi pariwisata negara mampu berperan dalam perekonomian Indonesia sebagai salah satu sumber peneromaan negara yang didapat dari konsumsi wisatawan selama melakukan perjalanan ke daerah tujuan wisata Indonesia. Peranan divisi pariwisata ini penting dikembangkan dalam upaya pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pada kesejahteraan Masyarakat secara nasional. Pembangunan sektor pariwisata ini perlu kerja sama dari berbagai pihak pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, stakeholders, dan Masyarakat secara luas dalam menjaga kualitas layanan yang ditawarkan (Destiana & Yuningsih, n.d.). Pengembangan wisata halal menjadi alternatif bagi industri pariwisata di Indonesia seiring dengan tren wisata halal yang menjadi bagian dari industri ekonomi islam global.

Memenuhi kebutuhan wisatawan dengan sebaik mungkin adalah bagian penting dari promosi destinasi wisata (Destiana, 2020). Pengembangan sektor pariwisata khususnya pariwisata halal ditunjukkan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia sehingga dapat mendorong perekonomian nasional melalui kontribusi pendapatan berbagai pelaku serta sektor ekonomi di Indonesia.

Sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak di dunia, Indonesia berupaya terus mengembangkan wisata syariah di Tanah Air. Daya saing pariwisata Indonesia sekarang ini berada di peringkat ke-32 di dunia, dari sebelumnya berada di peringkat ke-44. Berbicara tentang wisata halal salah satu daerah yang paling populer di Indonesia adalah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Popularitasnya semakin meroket setelah Lombok memenangkan dua penghargaan internasional dalam ajang World Halal Travel Award 2015 di Uni Emirat Arab (UEA), yaitu World's Best Halal Tourism Destination dan World's Best Halal Honeymoon Destination dalam acara The World Halal Travel Summit di Abu Dhabi. Lombok berhasil meraih penghargaan tersebut dan mengalahkan kandidat negara-negara Muslim lainnya. Sejak memenangkan penghargaan World's Best Halal tersebut, nama pulau Lombok semakin dikenal di dunia, khususnya di kalangan para wisatawan mancanegara Muslim atau Muslim Traveler's.

Pariwisata halal dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan layanannya yang bersifat universal. Objek wisata, produk dan jasa wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama dengan objek, produk, jasa dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan etika syariah dan nilai-nilai. Maka pariwisata halal tidak terbatas hanya pada wisatawan religi. Dalam perkembangan pariwisata halal, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, pasal 1, yang dimaksud syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (The Minister of Tourism, 2014). Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain, yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah (peraturan ini telah dicabut melalui Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor 11 tahun 2016). Pembangunan kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan rencana induk pembangunan

kepariwisataan provinsi, rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten atau kota.

Pembangunan kepariwisataan adalah bagian integral dari rencana pembangunan Panjang nasional. Pada Undang-Undang RI nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, bab I, pasal 3, dinyatakan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pengembangan wisata halal penting karena manfaatnya tidak hanya dapat dirasakan oleh wisatawan Muslim. Wisata halal bersifat terbuka untuk semua kalangan orang. Kemenparekraf akan menggerakkan wisata halal di restoran, hotel, serta spa. Diharapkan wisata halal dapat menjadi Indonesia sebagai destinasi yang ramah untuk wisatawan Muslim dan memerlukan standarisasi. Ciri wisata halal antara lain ada paket-paket wisata halal yang meliputi destinasi ramah wisatawan Muslim, restoran, serta hotel, dan spa yang halal. Salah satu tujuan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif meluncurkan wisata halal adalah untuk menarik semakin banyak wisatawan mancanegara, terutama Muslim. Terselip pula alasan lain yang mendasari diluncurkan wisata halal. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata tahun 2013, dari sekitar 7 juta wisatawan dunia 1,2 juta diantaranya adalah Muslim, yang tentunya mengharapkan wisata berbasis sesuai dengan syariah. Dengan wisata halal, mereka akan mudah menemukan tempat ibadah, makanan dan minuman halal dan hotel. Namun, Indonesia meluncurkan wisata halal bukan hanya semata untuk menarik wisatawan mancanegara hingga meningkat jumlah kunjungannya per tahun saja akan tetapi keinginan dari turis domestic juga menjadi alasan. Hal tersebut dikarenakan menurut Kemenparekraf, semakin banyaknya jumlah wisatawan yang mengungkapkan kebutuhan dan keinginan mereka akan wisata halal.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kunjungan wisatawan Muslim serta memperluas basis pasar pariwisata negara Indonesia, yaitu :

a. Sertifikasi Halal:

Salah satu langkah utama dalam implementasi kebijakan pariwisata halal di Indonesia adalah pengembangan sertifikasi halal untuk hotel, restoran, dan fasilitas wisata lainnya. Sertifikasi halal ini memberikan jaminan kepada wisatawan Muslim bahwa produk dan layanan yang

mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah membentuk untuk mengawasi proses sertifikasi halal dan memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang ditetapkan.

b. Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Halal:

Indonesia memiliki infrastruktur pariwisata halal yang cukup matang, terutama di destinasi wisata populer seperti Bali, Lombok, dan Yogyakarta. Banyak hotel, restoran, dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan Muslim. Selain itu, beberapa destinasi wisata di Indonesia juga telah membangun fasilitas ibadah seperti masjid dan tempat wudhu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan Muslim yang berkunjung.

c. Promosi Pariwisata Halal:

Pemerintah Indonesia aktif mempromosikan pariwisata halal melalui berbagai kampanye pemasaran, termasuk promosi melalui media sosial, partisipasi dalam pameran pariwisata internasional, dan Kerjasama dengan agen perjalanan dan industri pariwisata lainnya. Program Wonderful Indonesia Halal Tourism juga telah diluncurkan untuk meningkatkan kesadaran tentang pariwisata halal di Indonesia dan menarik lebih banyak wisatawan Muslim bagi berbagai belahan dunia.

d. Implementasi kebijakan pariwisata halal di Indonesia telah memberikan dampak positif bagi ekonomi negara ini, dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Muslim dan pendapatan sektor pariwisata secara keseluruhan. Selain dampak ekonomi, kebijakan pariwisata halal juga telah memberikan dampak sosial yang positif dengan memperkuat toleransi antar budaya, mengembangkan Kerjasama antara sektor public dan swasta, serta memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara Muslim lainnya.

3. Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal Jepang

Jepang kini menjadi destinasi wisata yang lebih murah bagi wisatawan asing, terutama bagi wisatawan Asia dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu, Pemerintah Jepang juga semakin concern terhadap sektor pariwisata dan membahas mengenai isu dan prospek pariwisata di Jepang dalam pertemuan ministerial council. Dalam

pertemuan tersebut, Pemerintah Jepang juga menargetkan Jepang sebagai "Tourism Oriented Country" yang secara langsung dapat menarik wisatawan asing. Pariwisata merupakan salah satu kesuksesan dari kebijakan Abenomics. Di samping itu, sektor pariwisata sangat identik dengan jajanan atau makanan khas, pusat-pusat kerajinan dan oleh-oleh, serta peningkatan kebutuhan home stay untuk pengunjung. Hal ini akan menjadi peluang dan juga strategi untuk meningkatkan perekonomian Jepang.

Wisatawan asing yang berasal dari berbagai negara, suku, budaya dan kebiasaan masing-masing negara, sudah menjadi hal yang pasti bagi Jepang akan perlunya untuk memenuhi kebutuhan khusus pengunjung lintas negara atau asing. Maka dari itu, sangat penting bagi Jepang untuk mempertimbangkan pemenuhan akan kebutuhan dan fasilitas khusus tersebut. Dapat terlihat dari jumlah wisatawan yang masuk ke Jepang dari beberapa negara Islam, atau berpenduduk mayoritas beragama Islam. Selain itu, Jepang juga semakin meningkatkan Kerjasama ekonomi dengan sejumlah negara-negara berpenduduk muslim, seperti Brunei Darussalam, Indonesia, dan Malaysia.

Dengan meningkatkan jumlah wisatawan muslim, pada beberapa tahun ini, pengusaha Jepang mulai concern mengenai kebutuhan makanan halal dan fasilitas untuk wisatawan muslim di Jepang. Saat ini, mulai dapat ditemukan makanan yang berlabel halal di tempat-tempat tertentu, seperti contohnya salah satu supermarket di Jepang bernama Gyomu Super, di tempat ini menyediakan makanan yang dapat dikonsumsi oleh kaum Muslim.

Pariwisata memberikan dampak atau isu yang terkadang memberikan pilihan untuk masukan pengelolaan pariwisata, atau dalam hal ini menjadi koreksi yang nantinya menjadi input dari pembangunan ekonomi pariwisata, seperti halnya adanya peningkatan wisatawan muslim di Jepang. Berbicara mengenai pariwisata Jepang, harus diingat bahwa terdapat kenaikan angka wisatawan dari negara yang diaman penduduknya mayoritas beragama Islam, itu berarti terdapat peningkatan wisatawan muslim ke Jepang. Disinilah diaman urgensi makanan halal untuk wisatawan muslim, dan trend saat ini terhadap halal foods yang sedang mengglobal.

Sekarang Ini, Halal foods menjadi fenomena dan trend pasar saat ini, membuat pebisnis mengusahakan langkah pemerintah Jepang dalam strategi untuk meningkatkan ekonomi dari sektor pariwisata. Terdapat banyak event yang diadakan oleh banyak asosiasi pebisnis di Jepang, salah satu

contohnya HDC (Halal Development Council) yang mengadakan Japan Halal Summit yang pertama (Japan Halal Summit 2014), di Jepang pada tahun 2014. Acara tersebut dihadiri oleh HE Manabu Sakai the Deputy Minister, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism of Japan. H.E. dalam pidatonya, Manabu merespon usaha HDC yang sejalan dengan tujuan pemerintah Jepang untuk target angka 20 juta wisatawan ke Jepang. Pandangan yang diberikan terhadap acara tersebut memperkuat bahwa Pemerintah Jepang juga menyambut baik peningkatan wisatawan muslim dan juga kebutuhan khususnya.

Dengan ini, berarti Jepang memberikan dukungan terhadap berkembangnya wisata halal, karena secara tidak langsung mendorong pebisnis untuk meningkatkan servisnya terhadap wisatawan muslim, dalam rangka meningkatkan pendapatan pariwisata.

Upaya yang dilakukam Pemerintah Jepang untuk menarik lebih banyak wisatawan Muslim, yaitu:

- a) **Penyediaan Makanan Halal:**
 Jepang telah mengambil langkah-langkah untuk menyediakan makanan di restoran, toko, dan fasilitas umum di daerah wisata populer seperti Tokyo, Kyoto, dan Osaka. Ini termasuk pelatihan bagi koki dan pelayan untuk memahami kebutuhan dan persyaratan makanan halal. Beberapa restoran dan toko di Jepang juga telah memperoleh sertifikasi halal, menunjukkan komitmen mereka untuk menyediakan makanan yang sesuai dengan prinsip halal bagi wisatawan Muslim.
- b) **Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Halal**
 Meskipun masih dalam tahap pengembang, Jepang terus memperluas infrastruktur pariwisata halal, termasuk akomodasi yang ramah Muslim dan fasilitas ibadah seperti masjid. Beberapa hotel di Jepang juga telah menyediakan fasilitas khusus untuk wisatawan Muslim, seperti tempat sholat dan alat-alat mandi halal. Pemerintah Jepang juga telah berupaya meningkatkan aksesibilitas bagi wisatawan Muslim dengan menyediakan informasi tentang tempat-tempat makanan halal, masjid, dan fasilitas lainnya dengan berbagai Bahasa, termasuk bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
- c) **Promosi Pariwisata Halal**
 Jepang telah aktif mempromosikan pariwisata halal melalui berbagai platform, termasuk media sosial, situs

web resmi pariwisata, dan partisipasi dalam pameran pariwisata internasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan Muslim untuk mengunjungi Jepang. Upaya promosi ini juga melibatkan Kerjasama dengan negara-negara Muslim dan organisasi internasional, serta partisipasi dalam acara-acara yang menarik perhatian pasar pariwisata halal global.

- d) **Dampak Ekonomi dan Sosial**
 Implementasi kebijakan pariwisata halal di Jepang telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan, termasuk peningkatan jumlah kunjungan wisatawan Muslim dan pendapatan sektor pariwisata secara keseluruhan. Selain dampak ekonomi, kebijakan pariwisata halal juga memeberikan dampak sosial yang positif dengan meningkatnya tolerasni dan pengertian antarbudaya di Jepang, serta memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara Muslim.

4. Negara yang Unggul dalam Implementasi Kebijakan Pariwisata Halal

Negara termasuk ke dalam negara yang unggul untuk pariwisata halal. Karena dilihat dari perkembangan-perkemabngan di setiap provinsi di Indonesia yang semangat dalam memajukan pariwisata halal. Indonesia berhasil menduduki posisi kedua sebagai destinasi wisata favorit traveller muslim milenial. Namun pada implementasinya patut diperhatikan dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia, khussunya Kementrian Pariwisata terkait keberadaan pariwisata halal di Indonesia salah satunya harus adanya koordinasi secara berkala dalam pembaruan regulasi-regulasi pariwisata halal di Indonesia antara lembaga yang menaungi aturan sertifikasi dan standarisasi halal yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan Kementrian Pariwisata. Selain itu Perencanaan dan implementasi kebijakan pariwisata halal ini harus lebih memperhatikan jejaring Kebijakan.

Sedangkan implementasi kebijakan pariwisata halal di Jepang masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Jepang, yaitu pertama, terbatasnya jumlah restoran halal di kota kecil padahal wisatawan Muslim juga tertarik untuk mengunjungi kota-kota kecil di Jepang. Kedua, belum terdapat badan sertifikasi halal yang ditunjuk secara resmi oleh Pemerintah Jepang. Banyaknya jumlah lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal dan adanya lembaga yang dengan mudah mengeluarkan sertifikaasi halal

membbingungkan perusahaan Jepang. Pemerintah Jepang sebaiknya menentukan lembaga sertifikasi halal mana saja yang dapat mengeluarkan sertifikat halal untuk perusahaan-perusahaan Jepang dengan menjalankan prosedur yang semestinya. Langkah ini akan membantu Perusahaan-perusahaan Jepang yang saat ini kesulitan menentukan kemana harus mendaftarkan produknya. Ketiga, terbatasnya jumlah mushola yang menyediakan fasilitas wudhu. Adanya fasilitas berwudhu akan memudahkan wisatawan Muslim dalam menjalankan ibadah sholat. Karena keterbatasan waktu, masig terdapat beberapa hal yang belum dibahas dalam penelitian ini terutama dari sisi supply side key themes seperti fasilitas transportasi, fasilitas di objek wisata, agen perjalanan, dan sumber daya manusia yang terlibat dalam bisnis pariwisata di Jepang.

Berikut adalah perbandingan mengenai negara yang unggul dalam implementasi kebijakan pariwisata halal:

A. Indonesia:

- Keunggulan:
 - Infrastruktur yang Matang: Indonesia memiliki infrastruktur pariwisata halal yang sudah matang, terutama di destinasi wisata populer seperti Bali, Lombok, dan Yogyakarta. Banyak hotel, restoran, dan fasilitas wisata telah mengadaptasi diri dengan menyediakan layanan dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan Muslim.
 - Ketersediaan Sertifikasi Halal: Indonesia memiliki sistem sertifikasi halal yang sudah mapan, dengan badan yang bertugas mengawasi proses sertifikasi dan memastikan kepatuhan terhadap standar halal yang ditetapkan. Hal ini memberikan jaminan kepada wisatawan Muslim bahwa produk dan layanan yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.
- Pembatasan:
 - Kurangnya Promosi Global: Meskipun memiliki infrastruktur yang matang, Indonesia masih memiliki potensi untuk meningkatkan promosi pariwisata halal secara global. Upaya promosi yang lebih agresif dan terarah dapat membantu menarik lebih banyak wisatawan Muslim dari berbagai belahan dunia.

B. Jepang:

- Keunggulan:
 - Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Halal: Jepang terus memperluas infrastruktur pariwisata halal, termasuk akomodasi yang ramah Muslim dan fasilitas ibadah seperti masjid. Beberapa hotel di Jepang juga telah menyediakan fasilitas khusus untuk wisatawan Muslim, seperti tempat sholat dan alat-alat mandi halal.
 - Promosi Global yang Efektif: Jepang telah aktif mempromosikan pariwisata halal melalui berbagai platform, termasuk media sosial, situs web resmi pariwisata, dan partisipasi dalam pameran pariwisata internasional. Hal ini telah meningkatkan kesadaran dan minat wisatawan Muslim untuk mengunjungi Jepang.
- Pembatasan:
 - Kurangnya Infrastruktur yang Matang: Meskipun telah mengembangkan infrastruktur pariwisata halal, Jepang masih memiliki ruang untuk meningkatkan ketersediaan layanan dan fasilitas bagi wisatawan Muslim. Beberapa daerah di Jepang mungkin masih kurang memiliki fasilitas halal dibandingkan dengan destinasi wisata lainnya di Asia.

5. Kesimpulan dan Saran

1. Pariwisata sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia, sehingga pariwisata memiliki dampak positif dan negative pada semua aspek kehidupan manusia seperti ekonomi, masyarakat, lingkungan dan bidang lainnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah akan dapat mengembangkan pariwisata di Indonesia secara terpadu dengan membangun sarana dan prasarana atau objek yang dapat menjadi daya tarik wisata. Pemerintah juga dapat melakukan program seperti studi banding wisatawan dan lain-lain untuk mendukung potensi wisata daerah. Melihat potensi industri pariwisata Indonesia ke depan, diperlukan berbagai strategi untuk menarik lebih

banyak wisatawan mancanegara dan mengembangkan pariwisataSt Indonesia. Dalam wisata halal diperlukan beberapa aspek utama yaitu fasilitas sholat yang memadai, tersedianya makanan halal, pelayanan buka puasa di bulan Ramadhan dan pembatasan kegiatan yang tidak mengikuti syariat. Tertarik dengan perkembangan industri di Indonesia. Secara khusus, saat ini dengan kemajuan teknologi dan perubahan zaman akan mampu memasarkan dan mengagregasi potensi wisata daerah dengan cara yang lebih inovatif, unik dan kreatif.

2. Untuk terus meningkatkan kunjungan wisatawan asing haruslah ada strategi didalamnya. Faktanya, data menunjukkan bahwa terdapat peningkatan wisatawan dari negara-negara Islam. Dalam ketentuan islam, diharuskan dan diwajibkan untuk memilih makanan halal atau kata lain terdapat ketentuan makanan yang dapat dikonsumsi oleh wisatawan muslim. Mengingat negara Jepang tidak termasuk kedalam negara Islam, secara otomatis aka nada permintaan pasar untuk halal foods, karena makanan adalah kebutuhan pokok, begitu juga makanan halal bagi wisatawan muslim.
3. Hak dan kewajiban pemerintah daerah dan Masyarakat adalah menjadi wadah yang dapat menampung, menopang dan mengembangkan pariwisata daerah dengan tujuan mewujudkan Indonesia yang lebih baik di masa depan. Diharapkan dengan adanya media baik offline maupun online, pembelajaran ekonomi dapat disajikan dengan lebih baik untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat, khususnya untuk sektor pariwisata di Indonesia. Pariwisata untuk perekonomian Indonesia yang lebih baik di masa depan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada dosen pengampu dan tim yang membantu tulisan ini.

Daftar Pustaka

- Alty Amalia, F., Indra Gunawan, A., & Wibisono, N. (n.d.). Citra Destinasi Wisata Halal di Jepang: Wisatawan Dan Non-Wisatawan Muslim Dari Indonesia. *Jurnal Bisnis & Kewirausahaan*, 17, 2021. <http://ojs.pnb.ac.id/index.php/JBK>
- Damayanti, K. A. (n.d.). *Pengembangan Industri Pariwisata Halal di Jepang Dalam Rangka Menarik Wisatawan Muslim*.
- Destiana, R. (2020). *Pengembangan Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau*. 2(1). www.kemenpar.go.id,
- Destiana, R., & Yuningsih, T. (n.d.). *Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau*. www.kemenpar.go.id,
- Malang, U. N. (2017). *Upaya Diplomasi Kerjasama Kebudayaan Indonesia Dan Jepang Guna Meningkatkan Sektor Pariwisata Dicky Putralisindra* (Vol. 1, Issue 2).
- Millatina, A. N., Hakimi, F., Zaki, I., & Yuningsih, I. (2019). Peran Pemerintah Untuk Menumbuhkan Potensi Pembangunan Pariwisata Halal Di Indonesia. In *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia* (Vol. 5, Issue 1).
- Munir, U., & Dimiyati, K. (2018). *Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum; Issn: 2407-8778 Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Pulau Lombok* (Vol. 4). <http://yustisia.unmermadiun.ac.id/index.php/yustisia>
- Rachmiatie, A., Fitria, R., Suryadi, K., & Ceha, R. (2020). Strategi Komunikasi Pariwisata Halal Studi Kasus Implementasi Halal Hotel Di Indonesia Dan Thailand. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i1.5256>
- Surwandono, S., Nursita, R. D., Diana, R., & Meiliyana, A. (2020). Polemik Kebijakan Wisata Halal di Indonesia serta Tinjauannya dalam Maqashid Syariah. *Tsaqafah*, 16(1), 91. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v16i1.3594>
- Yasin, Z. (n.d.). *Review Peraturan dan Kebijakan Pemerintah terhadap Pariwisata di Indonesia*.